

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja.Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja dan menelan korban juga siapa saja. Kejahatan dapat terjadi dalam semua aktifitas kehidupan apa saja dan juga sector olah raga juga. Artinya kejahatan akan selalu ada ibarat kematian dan sakit yang akan terus menimpa manusia.

Salah satu kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh supporter olah raga sepak bola. Berbagai media mencatat belakangan ini sering terjadi kejahatan kekerasan suporter bola baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Di Jawa timur, pada tahun 2017 tercatat ada 9 kasus kekerasan supporter yang mengakibatkan tidak hanya korban luka tetapi sampai meninggal dunia. Taruhlah seperti pada tanggal 1 oktober 2017 terjadi kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh bonek terhadap salah seorang supporter lawan yang kebetulan anggota persilatan setia hati.<sup>1</sup>Kejadian sebagaimana tersebut sebenarnya tidak terjadi hanya pada komunitas supporter bonek, tapi juga supporter lainnya seperti sakerah mania (Persekapas), Kacong Madureh (Madura United) dan beberapa kelompok supporter lainnya seperti Aremania Malang.

Bentuk-bentuk kejahatan kekerasan tersebut sesungguhnya adalah tindak pidana, dan kepada pelakunya tentu dapat dijerat dengan hukum

---

<sup>1</sup> Cds, *Bentrok Suporter (Bonek) dengan Anggota PSHT*, Jawa Pos edisi 2 Oktober 2017, hlm. 13.

pidana. Dalam segi hukum banyak yang terkait yang bisa dilakukan. Pertama penganiayaan, melempar batu kena kepala, penganiayaan berat atau ringan, dijaring dengan Pasal 351 KUHP. Melempar dari kejauhan, jika tertangkap, mudah penanganannya, sebaliknya jika tidak tertangkap otomatis sulit mengendalikan.

Yang kedua, jika terjadi pembunuhan. Pembunuhan mungkin tidak sengaja, tetapi ada satu pasal yang menyebut penganiayaan yang menyebabkan korban mati, Untuk ini yang terkait Pasal 351 KUHP dan seterusnya, intinya ancaman hukumannya cukup berat.

Pengrusakan barang, kerusakan mobil, stadion, dan lain-lain dijaring oleh Pasal 406 KUHP dengan ancaman hukuman cukup berat. Pengeroyokan, Pasal 170 KUHP adalah penganiayaan orang oleh orang yang lebih dari satu orang. Melawan petugas, karena hasutan diancam dengan Pasal 160 KUHP. Pasal 310 KUHP dan seterusnya menangani tentang penghinaan, sementara pelecehan seksual terhadap penonton perempuan, dijaring dengan Pasal 282 KUHP atau Pasal 335 ayat 1e KUHP.

Fakta yang ada jaringan hukum sudah menyediakan pasal-pasal yang bisa diterapkan pada pelaku. Namun selalu terbentur masalah pembuktian. Jika bisa tindak pidana dibuktikan maka akan sangat baik. Untuk itu diperlukan rangkaian investigasi yang rumit dan tidak mudah. Tapi tidak mustahil untuk dilakukan.

Kejadian di Indonesia beberapa waktu lalu, berdasarkan hasil penelitian banyak disebabkan oleh faktor internal pelaku, yaitu yang lebih mementingkan kemenangan tim yang didukung atau lebih pada pertimbangan

rasa egosentris belaka. Faktor lain seperti penegakan hukum sangat sedikit diungkap, padahal faktor ini tidak kalah pentingnya sebagai faktor kriminogen.

Kenyataan yang tak dapat dipungkiri lagi, bahwa model penanganan terhadap kejahatan kekerasan suporter dengan menggunakan sistem peradilan pidana di atas jarang dilakukan, walaupun dipakai penerapannya sangat lemah dan terkesan mentolerir dan memaafkan (*Diskresi*). Padahal Diskresi aparat penegak hukum (aparat kepolisian) yang berlebihan itu, menurut hemat penulis, justru merupakan faktor penyebab (*kriminogen*) timbulnya kejahatan serupa di kemudian hari, bahkan mungkin terjadi peningkatan kejahatan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian awal penulis, dalam beberapa pertandingan sepak bola Arema di Malang. Meski terlalu dini untuk dijadikan dasar kesimpulan yang representatif, namun dari data yang diperoleh menunjukkan angka yang cukup mengejutkan dan memprihatinkan. Dari 8 kali pertandingan yang dilakukan Arema di stadion Kanyuruhan Malang (Kepanjen), rata-rata disaksikan oleh 15 ribu-an penonton, tersebar dari berbagai penjuru Malang raya. Sebagian dari mereka menuju ke stadion melewati jalan raya Dinoyo, terutama penonton dari wilayah barat (Batu, Karangploso, Pujon, Ngantang dan Kasembon). Umumnya mengendarai sepeda motor.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam setiap hari (ketika ada pertandingan), pengendara motor yang melintas di jalan raya Dinoyo berkisar 500-600 motor (teridentifikasi suporter melalui atribut yang dipakai). Yang memprihatinkan, ternyata hampir 85% dari mereka tidak mematuhi peraturan

lalu lintas, seperti tidak berhelm, boncengan lebih dari 2 orang, dan melintas secara bergerombol melewati margin pembatas jalan.

Anehnya kejadian itu dibiarkan oleh aparat kepolisian yang sedang bertugas. Bahkan tidak hanya dibiarkan tetapi seolah-olah dilegalkan, yaitu kepadanya diberi perlakuan khusus, selain pengawalan, juga diberi kesempatan terlebih dulu untuk menggunakan jalan, dengan memberhentikan pengendara lain. Perlakuan ini, sangat dipahami oleh para suporter bahwa diri mereka memang diberi perlakuan khusus oleh aparat kepolisian.

Dalam sebuah kesempatan, pernah terjadi sebuah peristiwa, dimana rombongan kendaraan suporter berserempetan dengan kendaraan lain yang bukan suporter. Meski sebenarnya menurut kacamata penulis, yang salah adalah kendaraan suporter karena terlalu jauh melintasi marka pembatas jalan. Namun justru kelompok suporter itu menyalahkan pengendara lain tersebut, bahkan memukuli beramai-ramai, serta merusak kendaraanya.

Kejadian itu, menurut hemat penulis, menunjukkan bahwa sikap kawanan suporter secara tidak langsung dipicu oleh lemahnya tindakan aparat kepolisian dalam menangani kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran kecil sebelumnya, artinya pada diri suporter tertanam pemahaman bahwa pada dirinya melekat stigma “kebal hukum”, sehingga apapun yang mereka perbuat tidak akan ditindak oleh aparat kepolisian.

Mungkin saja aparat kepolisian berpijak pada ketentuan yuridis, yang memang memberi peluang dalam menjalankan tugas melakukan diskresi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, khususnya pasal 18 ayat 1, yang berbunyi :

“Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Lebih lanjut dipertegas dalam ayat 2 : “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 18 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaian sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko atas tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian bahwa Diskresi aparat kepolisian adalah suatu tindakan kepolisian berdasarkan atas penilaian sendiri seorang petugas kepolisian dalam rangka kepentingan umum. Dalam pelaksanaannya, tindakan disresi tetap harus memperhatikan rambu-rambu aturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral (*noodzakelijk*), tidak dimuati interes pribadi (*zakelijk*), serta harus terukur atau seimbang antara tindakan polisi dengan berat ringannya kesalahan (*even redig*) serta tepat situasi (*doelmatig*).<sup>2</sup>

Artinya tidak masalah, jika diskresi dilakukan atas dasar pertimbangan kualitas kasus, prioritas kegiatan karena keterbatasan sumber daya, perbedaan dalam memandang pelaku kejahatan suporter apakah membahayakan masyarakat atau tidak terlalu membahayakan, dan keselamatan anggota.

---

<sup>2</sup>Kelana Momo, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, Penerbit: PTIK dan PT. Grasindo.

Tetapi, akan menjadi permasalahan, jika aparat kepolisian melakukan tindakan diskresi dalam setiap penanganan kejahatan, dengan tanpa mempertimbangkan bahwa diskresi yang ditempuh sesungguhnya justru menjadi faktor kriminogen (penyebab) dari kejahatan lain yang menimbulkan dampak yang lebih besar.<sup>3</sup>

Dalam pandangan kriminologi, perilaku kejahatan harus dipandang sebagai suatu akibat karena di balik itu ada alasan-alasan yang mendorong mengapa kejahatan itu dilakukan. Persoalan hukum tidak boleh semata-mata dilihat dari sisi materiel saja, tetapi harus dilihat dari sisi sosiologis dan psikologis.<sup>4</sup>

Jika demikian, maka sesungguhnya patut untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun langkah penanggulangan lebih lanjut. Sebab dalam kriminologi dikenal teori tentang pencegahan kejahatan jenis *abolisionistik*, yaitu penanggulangan kejahatan dengan mencari data dan fakta faktor penyebabnya (*kriminogen*).

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam skripsi ini mengangkat beberapa rumusan masalah terkait dengan asumsi yang telah dikemukakan, yaitu sebagai berikut :

1. faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi timbulnya kejahatan kekerasan suporter sepak bola ?;
2. bagaimana corak tindakan diskresi aparat kepolisian dalam menangani kejahatan suporter sepak bola ?;

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Stephen Hurwist, 1986, *Kriminologi*, Jakarta, Penerbit: Bina Aksara.

3. apa yang menjadi pertimbangan aparat kepolisian dalam melakukan tindakan distressi tersebut ?;
4. apakah faktor diskresi aparat kepolisian dalam menangani kejahatan suporter merupakan faktor kriminogen timbulnya kejahatan kekerasan massa ?;

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini, diharapkan memiliki arah dan tujuan secara umum adalah sebagai berikut :

1. mendiskripsikan dan menjelaskan faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi timbulnya kejahatan kekerasan suporter sepak bola ;
2. mengetahui bagaimana corak tindakan diskresi aparat kepolisian dalam menangani kejahatan suporter sepak bola ;
3. mengetahui dan mendiskripsikan apa yang menjadi pertimbangan aparat kepolisian dalam melakukan tindakan distressi tersebut;
4. mengetahui dan menjelaskan apakah faktor diskresi aparat kepolisian dalam menangani kejahatan suporter merupakan faktor kriminogen timbulnya kejahatan kekerasan massa.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini, diharapkan mampu menghasilkan manfaat dan kegunaan antara lain sebagai berikut :

1. Secara akademik, diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum khususnya bidang Ilmu hukum Pidana maupun bidang ilmu Kriminologi, serta mampu memperkaya wawasan terutama berkaitan dengan bekerjanya hukum dalam masyarakat;

2. Secara praktis, khususnya bagi kalangan penegak hukum, diharapkan sebagai bahan masukan bahwa dalam penanganan kejahatan suporter dibutuhkan keseriusan, konsistensi dan kekonsekuenan, mengingat salah satu penyebab timbulnya kekerasan massa tidak lebih disebabkan oleh tindakan diskresi aparat kepolisian.

## E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, dilakukan beberapa tahapan langkah atau tindakan yang tersusun sebagai berikut.

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum Empirik, faktor yang pokok terutama adalah studi lapangan (*field research*). Oleh karenanya dalam meneliti kejahatan, secara umum, menurut Soedjono Dirdjosisworo dikenal tiga cara pendekatan, yaitu pendekatan deskriptif, pendekatan kausal dan pendekatan normatif.<sup>5</sup>

- a. **Pendekatan Deskriptif**, yaitu memberikan gambaran tentang kejahatan dan pelakunya melalui pengamatan (observasi) dan pengumpulan fakta-fakta kejahatan dan pelakunya, seperti jenis-jenis kejahatan, frekuensinya, jenis kelamin, umur serta ciri-ciri lainnya. Pendekatan Deskriptif ini dapat pula diartikan sebagai observasi terhadap kejahatan dan penjahat sebagai gejala sosial, sehingga disebut juga pendekatan fenomenologi atau sitomatologi.
- b. **Pendekatan Kausal atau Etiologis**, yaitu pendekatan dengan menggunakan metode interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh,

---

<sup>5</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Hlm.112.



guna ditemukan faktor penyebabnya. Pendekatan kausal ini juga dapat berupa suatu interpretasi tentang fakta yang dapat digunakan untuk mencari sebab musabab kejahatan baik secara umum maupun dalam kasus-kasus individual. Pendekatan ini disebut sebagai etiologi kriminal.

- c. **Pendekatan Normatif**, yaitu melakukan telaah atau pengkajian terhadap fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan aspek hukumnya, apakah fakta-fakta itu merupakan suatu kejahatan atau tidak. Sehingga diharapkan dengan pendekatan normatif ini kriminologi berperan dalam proses kriminalisasi dan de-kriminalisasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

Sedangkan menurut Mannheim metode yang dapat digunakan dalam penelitian Kriminologi metode primer dan metode sekunder.<sup>6</sup>

(a) **Metode Primer**, yaitu meliputi :

1. **statistik Kriminal**, yaitu angka-angka yang menunjukkan jumlah kriminalitas yang tercatat dalam suatu tempat dan waktu tertentu;
2. **tipologi**, yaitu mempelajari kejahatan dan penjahat dengan melihat ciri-ciri dan fenomena tersebut; dan
3. **studi kasus**, yaitu mempelajari kejahatan dengan melalui penyelidikan terhadap kasus-kasus dengan secara mendalam seperti tentang sejarah kejahatannya (karier) dan sejarah kehidupan lainnya yang dipandang relevan.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

Ini dapat dilakukan dengan wawancara, kuesioner, otobiografi dan sebagainya.

(b) **Metode sekunder.** Penggunaan metode ini biasanya bersama-sama dengan salah satu atau lebih metode primer. Yang termasuk metode sekunder adalah :

1. *metode sosiologis*, yaitu mempelajari komunitas, lembaga, daerah yang dipandang mempunyai relevansi dengan kejahatan;
2. *metode eksperimental*. Metode ini biasanya dipakai dalam Ilmu Alam (Eksakta) dan Psikologi. Di dalam Kriminologi, metode ini terutama dipakai untuk studi tentang pemicu dan etiologi kriminal;
3. *metode prediksi*. Metode ini misalnya dipakai untuk meramalkan perilaku anak di masa depannya; dan
4. *metode operasional (action research)*. Metode ini terutama digunakan untuk usaha-usaha pencegahan kejahatan atau perbaikan dalam tindakan terhadap pelaku kejahatan.

Berkenaan dengan metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah menggunakan metode pendekatan Kriminologis (*Etiologi kriminal*). Dalam pendekatan Kriminologis ini, penulis melakukan kajian dari aspek causa (faktor penyebab) kejahatan kekerasan supporter, sebagai bahan analisis menuju kepada kebenaran hipotesa yang telah dirumuskan penulis.

## **2. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu), kebetulan lokasi komunitas supporter Aremania Malang ini tersebar di wilayah tersebut, dengan dasar pertimbangan di wilayah ini berdasarkan observasi awal ditemukan adanya praktek-praktek kekerasan kelompok supporter yang cukup membahayakan masyarakat. Dasar pertimbangan lainnya adalah, bahwa dalam konteks persepakbolaan nasional Malang, boleh dikatakan sebagai barometer persepakbolaan nasional, yang gairah masyarakatnya dalam beberapa tahun terakhir belum ada yang menandingi. Namun yang menarik justru fenomena supporter Aremania, mengingat komunitas Aremania selain jumlahnya mencapai lebih 40 ribu, juga komunitas Aremania sering identik dengan kekerasan.

### **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang ditempuh adalah melakukan pengumpulan data, yakni data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder.

- a. **Data Primer** adalah data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan maupun studi lapangan secara langsung kepada responden.

Data primer ini diperoleh dengan penelitian lapangan ke beberapa tempat / lokasi pertandingan, maupun basis-basis Koordinator Wilayah

(Korwil) komunitas supporter Aremania yang dipilih sebagai lokasi penelitian dimaksud di atas.

- b. **Data Sekunder** adalah data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku literatur secara teoritis, berbagai peraturan perundangan yang berlaku, majalah, artikel / karya ilmiah atau seringkali disebut dengan “studi kepustakaan”.

Menurut Winarno Surakhmad yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah : “Pengumpulan bahan-bahan yang harus digali dari kepustakaan, misalnya arsip-arsip, dokumen-dokumen, majalah-majalah ilmiah, buku-buku dan sebagainya”. permasalahan, yaitu literatur-literatur khususnya bidang Kriminologi, majalah, koran serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, di samping itu referensi tentang peraturan perundangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data<sup>7</sup>

Selanjutnya dalam pengumpulan data, penulis melakukan berbagai teknik pengumpulan data, yang tersusun berdasarkan urutan langkah kegiatan berupa : *Pertama*, melakukan **Dokumentasi**, yaitu pencatatan terhadap data-data / dokumen tertentu dari suatu obyek yang ada, sehingga diperoleh data dan informasi yang realistik guna membahas permasalahan yang telah dirumuskan.

Mengenai “dokumentasi” ini Roni Hanitidjo Soemitro memberikan pengertian bahwa, “Dokumentasi adalah pencatatan yang dilakukan secara

---

<sup>7</sup>Emzir, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hal. 3

sengaja dan sistematis mengenai data-data maupun dokumen untuk kemudian dilakukan pentabelan”.

Dalam dokumentasi ini penulis melakukan pencatatan secara sistematis dan teratur tentang semua masalah yang ada hubungannya dengan jenis-jenis kekerasan supporter, waktu dan tempat kejadian, latar belakang atau penyebab pelaku melakukan kekerasan tersebut, siapa saja korbannya, dan apa saja akibat atau kerugian yang ditimbulkannya, serta mencatat pula bagaimana upaya-upaya penegakan hukumnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Keseluruhan data-data dimaksud diperoleh berdasarkan informasi data dari sumber kliping koran yaitu : Jawa Pos Radar Malang, Kompas dan Surya, data dari pengurus klub Arema dan data dari Polres di Malang Raya.

Selanjutnya langkah *Kedua*, penulis melakukan **observasi**, yaitu pengamatan secara langsung terhadap suatu gejala yang nampak di lokasi penelitian, yang berguna sebagai bahan kajian untuk dikaji dan dibahas sesuai dengan rujukan teori dan peraturan perundangan.

Menurut Winarno Surahmad, bahwa yang dimaksud dengan observasi adalah “penelitian di luar kepustakaan, seperti di tengah-tengah masyarakat atau di dalam laboratorium, dan lain-lain”.

Dalam observasi ini penulis melakukan peninjauan dan pengamatan langsung ke lokasi-lokasi yang terutama yang nyata-nyata terjadi tindak kekerasan supporter, sebagaimana diperoleh informasi dari studi dokumentasi, yaitu : dengan menonton setiap pertandingan Arema baik di Stadion Gajayana Malang maupun di Stadion Kanyuruhan Malang.

## 5. Populasi dan Sampel Penelitian<sup>8</sup>

Populasi adalah seluruh obyek atau individu atau gejala atau kejadian atau unit yang akan diteliti. Biasanya populasi sangat luas sehingga sering tidak mungkin untuk menelitinya. Oleh karena itu tidak perlu meneliti semua obyek untuk memberi gambaran tepat mengenai keadaan populasi tapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.

Dengan menggunakan metode “*purposive sampling*”, maka dalam penelitian ini dipilih sampel untuk mewakili populasi. Terutama disebabkan karena banyaknya populasi komunitas supporter. Dalam satu komunitas supporter seperti Aremania, tercatat tidak kurang dari 40 ribu supporter.

Untuk itu, dalam menentukan sampel didasarkan pada tujuan tertentu, sebagaimana digariskan oleh Ronny Hanitijo Sumitro (1993 : 20), haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasi;
2. subyek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi; dan
3. penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan.

Oleh karena itu, maka penulis memilih sampel berdasarkan kriteria di atas (yang memenuhi syarat di atas), sehingga penulis melakukan

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

wawancara/interview dengan sampel populasi para koordinator wilayah (korwil) Aremania, dengan dasar pertimbangan, mereka adalah orang-orang yang mengetahui secara pasti dan mendetail mengenai ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik komunitas suporter Aremania. Oleh karenanya sampel populasi yang diwawancarai dalam penelitian, antara lain adalah :

- 1). KorwilSuporter Aremania yaitu : Marheis, H.Slamet, Hizmi, Leo kailola, Nur Drum, Imam, Andri, Burhan, Yuli Sumpil, Kepet
- 2). Pengurus Arema : Iwan Budiyo
- 3). Pengurus PSSI dan Klub: Haris Thofly, Siaboe Harun NaserhHaruna Sumitro, Haris Thofly, Siaboe Haruin Naserh, Iwan Budiyo, Bambang Soeyono, Mardijoko, Urip S, Imam Supardi, Bambang Sugeng, Heri Bagio
- 4). Wasit : Soeryadi, Hariono, Heru Sugiri, Purwanto, Iwan Sukoco, A. Romadlon, Zainuri, Damhuji, Mukhlis T, Sulis A.
- 5). Aparat Kepolisian : Bambang Waluyo, Andi Setiawan anggota satlantas Polres Malang

## **6. Teknik Analisa Data<sup>9</sup>**

Dalam melakukan analisa data, penulis menggunakan teknik analisa diskriptif analisis, yaitu menurut Winarno Surakhmad metode diskriptif analitis adalah : “memusatkan diri pada data yang bersifat aktual, kemudian data yang ada tersebut, dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan diinterpretasi serta kemudian dianalisa”.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

Dengan metode deskriptif analisis ini, penulis melakukan langkah-langkah berupa mengumpulkan data-data lapangan, disusun secara sistematis, kemudian pengolahan data-data hasil yang diperoleh dalam penelitian lapangan dilakukan dengan cara memadukan atau menarik hubungan / korelasi dengan yang apa yang diperoleh dari studi kepustakaan (teori-teori, doktrin maupun ketentuan hukum), yang tujuannya adalah mendapatkan kesimpulan jawaban permasalahan yang telah dikemukakan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, disusun sistematika penulisan dalam beberapa bab berikut ini.

Bab I : Pendahuluan, yaitu memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penulisan, serta metode penelitian, yaitu berisi tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisa yang digunakan, serta sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, yaitu mengurai tentang landasan-landasan teoritis maupun yuridis yang dijadikan dasar rujukan dan bahan analisis dari topik yang hendak dikaji.

Bab III : Hasil Penelitian dan analisa, memuat tentang hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh, kemudian dilakukan analisis sesuai dengan topik permasalahan yang diangkat.

Bab IV : Penutup, yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi dari penulis.